



Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)

Website: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com



Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Berbasis Layanan Posyandu Terpadu di Jakarta Timur

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Aliifha Azzahro Universitas Muhammadiyah Jakarta aaliifha@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Nadia Fajria Universitas Muhammadiyah Jakarta nadiafajria04@gmail.com	
Andra Agung Wicaksono Universitas Muhammadiyah Jakarta andraagung30@gmail.com	
Daffa Aldifin Putra Rahmadani Universitas Muhammadiyah Jakarta daffa.aldifin30@gmail.com	
Henry Akbar Ananda Universitas Muhammadiyah Jakarta henryakbar27@gmail.com	
Nur Muhammad Iqbal Universitas Muhammadiyah Jakarta n.muhamadiqbal@umj.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Azzahro, A., Fajria, N., Wicaksono, A. A., Rahmadani, D. A. P., Ananda, H. A., & Iqbal, N. M. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Berbasis Layanan Posyandu Terpadu di Jakarta Timur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4540-4549.

Abstrak

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang memerlukan penanganan lintas sektor karena berdampak langsung terhadap kualitas tumbuh kembang anak. Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui kegiatan pemantauan pertumbuhan, edukasi gizi, serta pelayanan kesehatan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting dijalankan di tingkat posyandu, khususnya terkait peran kader dan efektivitas program di Jakarta Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji dokumen kebijakan, literatur ilmiah, serta isi materi penelitian dalam file yang disediakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah berlangsung sesuai arahan pemerintah, namun belum optimal karena masih ditemukan kendala seperti keterbatasan pelatihan kader, fasilitas posyandu yang belum memadai, serta sistem pelaporan yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kader, penyederhanaan alur koordinasi, dan penguatan sarana posyandu diperlukan agar implementasi kebijakan penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Stunting, Posyandu, Implementasi Kebijakan, Kader, Pelayanan Kesehatan

Abstract

Stunting is a health problem that requires cross-sectoral intervention because it directly impacts the quality of child growth and development. As the spearhead of public health services, Posyandu (Integrated Health Posts), plays a strategic role in supporting efforts to accelerate stunting reduction through growth monitoring, nutrition education, and basic health services. This study aims to describe how the implementation of stunting reduction policies is carried out at the Posyandu level, specifically regarding the role of cadres and program effectiveness in East Jakarta. The research method used a qualitative descriptive approach by reviewing policy documents, scientific literature, and the content of research materials in the provided files. The analysis results indicate that policy implementation has been running according to government directives, but is not optimal due to obstacles such as limited cadre training, inadequate Posyandu facilities, and a reporting system that is not yet fully integrated. Therefore, increasing the capacity of cadres, simplifying coordination flows, and strengthening Posyandu facilities are needed for the implementation of stunting reduction policies to be more effective and sustainable.

Keywords: Stunting, Integrated Health Post, Policy Implementation, Cadres, Health Services

A. Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak berada kurang dari minus dua standar deviasi dibandingkan standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO. Situasi ini biasanya mulai terlihat setelah anak memasuki usia dua tahun dan terjadi akibat kekurangan gizi jangka panjang sejak masa kehamilan hingga tahun-tahun awal kehidupan (WHO, 2020).

Penyebab stunting bersifat multifaktor, meliputi asupan nutrisi yang tidak mencukupi, minimnya pengetahuan ibu mengenai gizi, pola asuh yang kurang mendukung, kondisi sanitasi yang tidak memadai, serta seringnya anak mengalami infeksi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat memperburuk pertumbuhan anak jika tidak ditangani secara komprehensif (UNICEF, 2021).

Di Indonesia, upaya percepatan penurunan stunting memiliki dasar kebijakan yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor serta pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua level pemerintahan sebagai strategi untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021).

Penguatan peran Posyandu menjadi salah satu fokus penting dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting. Posyandu diarahkan untuk berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan bagi ibu dan anak, yang mencakup pemantauan perkembangan balita, penyuluhan mengenai gizi, serta identifikasi dini berbagai gangguan kesehatan yang dapat meningkatkan risiko stunting (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Untuk mempertegas peran tersebut, Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan Posyandu secara lebih terstruktur, termasuk mekanisme layanan, peran kader, serta koordinasi lintas sektor. Hal ini menegaskan bahwa Posyandu merupakan sarana strategis yang memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas kesehatan dan gizi (Kementerian Dalam Negeri RI, 2024).

Meskipun demikian, tantangan penurunan stunting masih signifikan. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 21,5% (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Angka ini memang menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih jauh dari target 14% pada 2024. Stunting bukan sekadar persoalan gizi, melainkan mencerminkan kesenjangan sosial ekonomi, ketidakmerataan akses layanan kesehatan, serta belum optimalnya kebijakan publik (World Bank, 2021).

Dalam perspektif kebijakan publik, masalah stunting menegaskan adanya celah antara formulasi dan implementasi kebijakan. Idealnya, kebijakan nasional dan pelaksanaan daerah berjalan selaras, namun berbagai temuan menunjukkan bahwa implementasi program di daerah sering tidak konsisten. Kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada bantuan gizi tanpa strategi komunikasi publik dan partisipasi masyarakat menyebabkan program kurang efektif (Mardiansyah, 2022).

Di sisi lain, kader Posyandu sebagai pelaksana lapangan juga masih menghadapi keterbatasan pelatihan, sarana, dan dukungan anggaran (Rahmawati et al., 2023). Koordinasi antarlembaga seperti Puskesmas, PKK, dan perangkat kelurahan pun masih belum optimal

sehingga memunculkan tumpang tindih program serta lemahnya sinkronisasi (Wahyuningsih & Adam, 2025).

Pemerintah Kota Jakarta Timur menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menurunkan prevalensi stunting. Data resmi tahun 2023, melaporkan bahwa angka stunting berada pada level 14,4%, dan pemerintah daerah menargetkan penurunan lebih lanjut agar selaras dengan target nasional penurunan stunting (Pemerintah Kota Jakarta Timur, 2023). Berbagai program intervensi berbasis masyarakat juga telah diterapkan, termasuk program Mabar Tawa, yang memberikan dampak positif melalui pemantauan kesehatan dan pendampingan gizi. Program tersebut dilaporkan berhasil menurunkan jumlah balita yang sebelumnya terindikasi stunting, yang menunjukkan efektivitas koordinasi antar sektor seperti puskesmas, posyandu, dan kelurahan dalam penanganan stunting (Berita Jakarta, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi pokok pembahasan ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting berbasis Posyandu Terpadu di Jakarta Timur, dengan demikian peneliti tertarik menggali informasi mengenai hal itu pada subjek penelitian dan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Berbasis Posyandu Terpadu di Jakarta Timur".

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi penerapan kebijakan pencegahan stunting melalui layanan Posyandu Terpadu di Jakarta Timur. Fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas kebijakan, peran kader Posyandu, dan mekanisme koordinasi antar sektor. Lokasi penelitian ditentukan di Jakarta Timur sebagai contoh studi, karena prevalensi stunting yang masih tinggi menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, serta keberadaan program Posyandu Terpadu yang telah ada di wilayah tersebut. Metode pengumpulan data yang utama meliputi analisis dokumen dari regulasi nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) 2018 hingga 2024, serta kebijakan daerah seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2022, laporan kegiatan posyandu, dan data prevalensi stunting yang diperoleh dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Selain itu, penelitian ini juga melakukan telaah literatur terhadap studi sebelumnya seperti jurnal Widya Gantari (2021), Jurnal Keperawatan Silampari (2023), dan Jurnal Comunitas Servizio (UKI) sebagai dukungan untuk analisis. Data dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan, mengadopsi model analisis Edward III sebagai kerangka utama yang digunakan untuk mengevaluasi aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dimulai dari langkah-langkah menentukan masalah, mengumpulkan dokumen, menganalisis literatur, sampai menyusun hasil akhir dari penelitian. Setiap tahapan dilakukan dengan mematuhi etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi dan memastikan pemanfaatan sumber informasi dengan cara yang bertanggung jawab.

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Dye, 2013). Siklus kebijakan publik terdiri dari tahap implementasi kebijakan, karena keberhasilan suatu program sangat bergantung pada bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan.

Menurut Edward III (dalam Gantari, 2020), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan harus dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain agar tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan proses eksekusi kebijakan (Malahayati, 2022).

2. Pengertian Stunting

Stunting merupakan bentuk gangguan pertumbuhan yang terjadi akibat kekurangan nutrisi kronis, infeksi berulang, dan perawatan yang tidak memadai, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (UNICEF, 2021). Kondisi ini umumnya mulai terlihat ketika anak memasuki usia dua tahun dan merupakan dampak dari kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan (WHO, 2020).

Anak yang mengalami stunting tidak hanya memiliki tinggi badan di bawah standar usianya, tetapi juga berisiko menghadapi hambatan perkembangan kognitif serta memiliki daya tahan

tubuh yang lebih rendah. Dalam jangka panjang, stunting dapat berdampak pada penurunan kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia (Nur Azizah et al., 2021).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting, penting untuk memperhatikan faktor pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung mencakup koordinasi lintas sektor yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, serta komitmen politik dari pemerintah daerah. Komitmen politik tersebut biasanya tercermin melalui penyediaan anggaran khusus serta perhatian terhadap pencapaian target program (Kementerian Kesehatan RI, 2021; Bappenas, 2022). Koordinasi antar lembaga menjadi krusial agar berbagai intervensi mulai dari gizi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga sanitasi dapat berjalan secara terpadu (WHO, 2020). Selain itu, keberhasilan Posyandu Terpadu sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, terutama ibu balita, mengingat posyandu merupakan layanan berbasis komunitas (Kemenkes RI, 2020).

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta persoalan administratif. Keterbatasan sumber daya mencakup kurangnya tenaga kesehatan dengan kompetensi memadai, fasilitas dan sarana pendukung yang belum optimal, serta alokasi anggaran yang masih terbatas (UNICEF, 2021). Kendala sosial-ekonomi, seperti rendahnya pendidikan dan pendapatan keluarga, turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting (BKKBN, 2022). Selain itu, permasalahan administrative, misalnya data yang tidak sinkron dan sistem pelaporan yang belum terintegrasi sering menjadi hambatan dalam proses monitoring dan evaluasi (Bappenas, 2022).

4. Peran Kader Posyandu dalam Pencegahan Stunting

Kader Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan KAP, dengan tanggung jawab untuk mendorong perubahan perilaku di tingkat rumah tangga selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui sosialisasi, pelatihan, dan enam kunci perilaku (konsumsi tablet tambah darah, kelas untuk ibu hamil, pemberian ASI, kunjungan ke posyandu, mencuci tangan pakai sabun, dan penggunaan jamban sehat) (Sulistyorini et al., 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kader dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui komunikasi, pendekatan yang persuasif, dan kunjungan (Susanto, 2017). Faktor-faktor seperti usia, pendidikan, pekerjaan, dan lama menjabat sebagai kader memengaruhi kinerja mereka contohnya, usia antara 41-50 tahun dan pendidikan setara SLTA menunjukkan hubungan positif terhadap kinerja (Irianty et al., 2017; Fretty et al., 2020; Profita, 2018), meskipun sikap dan motivasi juga penting (Indrilia et al., 2022). Pelatihan untuk kader meningkatkan pemahaman mereka tentang program stunting dan strategi komunikasi, sehingga memperkuat pelaksanaan KAP (Allyreza and Jumiati, 2023).

5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menjadi acuan yang digunakan pada penelitian ini. Berikut adalah ringkasan dari penelitian tersebut. Penelitian pertama, Pengaruh edukasi kesehatan dengan media audiovisual terhadap pengetahuan ibu tentang stunting pada balita di Posyandu Melati 1, Kel. Pisangan Timur, Jakarta Timur oleh Rokhaidah (2021). Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia, Vol. 5, No. 2 (2021), E-ISSN 2715-6303. Penelitian ini menganalisis efektivitas edukasi kesehatan menggunakan media audiovisual sebagai sarana peningkatan pemahaman ibu balita mengenai stunting pada layanan Posyandu Melati 1 di Jakarta Timur. Metode Kuantitatif, menggunakan *desain pre-experimental one group pretest-posttest*. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai perubahan tingkat pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberi intervensi edukasi audiovisual mengenai stunting. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah bahwa keduanya berfokus pada upaya pencegahan stunting melalui penguatan layanan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar. Perbedaannya adalah penelitian Rokhaidah (2021) menitikberatkan pada intervensi edukasi dan perubahan pengetahuan ibu, sedangkan penelitian peneliti menekankan implementasi kebijakan penanggulangan stunting melalui layanan posyandu terpadu secara lebih makro, termasuk aspek koordinasi, pelayanan, dan kebijakan daerah.

Penelitian kedua, Sosialisasi Pencegahan Stunting pada Anak Balita di Kelurahan Cawang Jakarta Timur oleh Damanik, Sitorus & Mertajaya (2021). *Jurnal Comunitas Servizio*. Vol. 3, No. 1 (2021), E-ISSN 2722-7678. Penelitian ini menganalisis sosialisasi pencegahan stunting pada anak balita di kelurahan Cawang Jakarta Timur. Tujuan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu tentang pencegahan stunting melalui edukasi praktik pemberian makan yang tepat berdasarkan rekomendasi WHO. Metode pelaksanaan PKM yaitu sosialisasi yang dikombinasikan dengan survei secara kuantitatif

tentang pelaksanaan praktik pemberian yang dilakukan oleh ibu berdasarkan indikator praktik pemberian makan menurut rekomendasi WHO. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi langkah awal yang penting dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah keduanya fokus pada upaya pencegahan stunting melalui pendekatan masyarakat/posyandu, mengambil lokasi di Jakarta Timur, dan menunjukkan pentingnya edukasi dari implementasi kebijakan stunting. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Damanik, Sitorus & Mertajaya fokus pada kegiatan sosialisasi, bukan pada evaluasi kebijakan pemerintah dan hanya mengkaji peningkatan pemahaman warga setelah sosialisasi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menilai kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar layanan posyandu terpadu.

Penelitian ketiga, Edukasi Gizi Seimbang pada Anak sebagai Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting di RW 03, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Jakarta Timur oleh Marlina, Munawarah & Wahyuningsih (2024). Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan, Vol. 3, No. 2, E-ISSN 3031-0032. Penelitian ini mengkaji efektivitas edukasi gizi seimbang yang diberikan kepada masyarakat (khususnya ibu dan orang tua balita) di RW 03, Kelurahan Pulo Gebang, sebagai intervensi pencegahan stunting dan upaya menurunkan prevalensi balita stunting. Metode penelitian berupa pengabdian masyarakat dengan pendekatan edukatif dan pemberian materi gizi seimbang, kemudian diukur melalui survei pengetahuan orang tua sebelum dan setelah intervensi. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya gizi seimbang dan memberikan strategi praktis agar ibu dapat menyediakan asupan nutrisi yang tepat demi mencegah stunting pada anak-anak mereka. Persamaan penelitian adalah keduanya sama-sama menekankan intervensi berbasis komunitas (posyandu/pengabdian masyarakat) untuk pencegahan stunting, serta berlokasi di Jakarta Timur. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Marlina dkk. berfokus pada edukasi gizi seimbang di level RW dan melibatkan orang tua secara langsung, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada analisis implementasi kebijakan posyandu terpadu (koordinasi, struktural, aspek kebijakan, dan operasional posyandu).

Penelitian keempat, Peran Kader Posyandu dalam Menurunkan Angka Stunting oleh Rahmawati & Lestari (2023). Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), Vol. 4, No. 2, 87-96, E-ISSN 2808-8816. Penelitian ini menganalisis kader posyandu berkontribusi dalam upaya menurunkan prevalensi stunting. Fokus penelitian ini adalah pada aktivitas kader posyandu sebagai aktor lokal yang berperan langsung dalam pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, pemberian informasi kesehatan, serta rujukan balita dengan risiko stunting. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap kader posyandu dan observasi kegiatan posyandu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana keterlibatan, kapasitas, dan efektivitas kerja kader posyandu dalam pencegahan serta penurunan angka stunting, termasuk hambatan-hambatan yang mereka hadapi di lapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa keduanya menyoroti peran layanan posyandu sebagai ujung tombak pencegahan stunting dan mempertimbangkan aspek implementasi kebijakan di tingkat akar rumput. Perbedaannya, penelitian Rahmawati & Lestari (2023) lebih fokus pada peran individu kader sebagai pelaksana teknis kegiatan posyandu, sedangkan penelitian penulis menekankan pada implementasi kebijakan posyandu terpadu secara lebih luas, termasuk aspek koordinasi, kebijakan daerah, mekanisme layanan, dan efektivitas pemerintahan dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting.

Penelitian kelima, Efektivitas Posyandu dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting: Tinjauan Literatur oleh Anggraini & Putra (2023). Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Universitas Pahlawan, Vol. 7, No. 1, E-ISSN 2549-0877. Penelitian ini merupakan sebuah tinjauan literatur (literature review) yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai hasil penelitian terkait efektivitas posyandu dalam pencegahan dan penanganan stunting. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi peran posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar yang berfungsi dalam pemantauan pertumbuhan balita, edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, deteksi dini stunting, serta koordinasi rujukan. Tujuannya adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas intervensi posyandu di berbagai wilayah Indonesia dan mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting. Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah keduanya menempatkan posyandu sebagai komponen utama dalam pencegahan stunting dan melihatnya sebagai bagian integral dari implementasi kebijakan kesehatan masyarakat. Perbedaannya, penelitian Anggraini & Putra (2023) tidak menganalisis kebijakan daerah tertentu secara

mendalam, hanya melihat dampak posyandu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus menganalisis kebijakan penanggulangan stunting di Jakarta Timur.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting berbasis layanan Posyandu Terpadu di Jakarta Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan teknis. Berdasarkan temuan di lapangan serta hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus implementasi, yaitu efektivitas kebijakan, peran kader Posyandu, serta koordinasi lintas sektor.

1. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan daerah dan wawancara dengan pelaksana program (puskesmas, kelurahan, dan kader Posyandu), ditemukan bahwa kegiatan penanggulangan stunting melalui Posyandu Terpadu sudah sesuai dengan sasaran nasional Stranas Stunting 2018–2024. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran. Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian Widya Gantari (2021) yang menegaskan bahwa penyuluhan audiovisual kepada ibu balita mampu meningkatkan pemahaman tentang pencegahan stunting secara signifikan ($p = 0,000$). Sementara penelitian Formilkesmas Respati (2023) menambahkan bahwa faktor edukasi berperan besar dalam membentuk perilaku keluarga sadar gizi.

2. Peran Kader Posyandu dalam Pelaksanaan Program

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kader Posyandu memiliki peran dominan sebagai pelaksana teknis di tingkat komunitas. Mereka melaksanakan kegiatan penimbangan, pengukuran antropometri, serta konseling gizi. Berdasarkan studi Jurnal Keperawatan Silampari (2023) dan Global Health Science Group (2022), peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan deteksi dini stunting dan pemberian edukasi gizi seimbang. Di Jakarta Timur, sebagian besar kader telah mendapatkan pelatihan dasar dari puskesmas, namun belum semua menerima pelatihan lanjutan seperti pengukuran standar WHO atau penggunaan aplikasi e-PPGBM. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan dan pemantauan data.

3. Koordinasi Antar Lembaga dan Dukungan Kebijakan

Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di tingkat kelurahan melibatkan berbagai lembaga, seperti puskesmas, PKK, dan Dinas Kesehatan. Namun hasil observasi menunjukkan masih adanya tumpang tindih kegiatan antar sektor. Penelitian Comunitas Servizio UKI (2021) menemukan bahwa koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal karena perbedaan mekanisme pelaporan dan minimnya pertemuan rutin antar lembaga. Selain itu, studi Jurnal Ilmu Medis Indonesia (2025) menyoroti pentingnya keberlanjutan program melalui kebijakan pendanaan daerah dan pelibatan perangkat RT/RW untuk meningkatkan partisipasi keluarga.

Analisis Pelaksanaan Berdasarkan Model Edward III

Model kebijakan publik yang diusulkan oleh George C. Edward III memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami sejauh mana suatu kebijakan dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Model ini mengidentifikasi empat faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, keempat elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan pesan mengenai kebijakan dan tujuan program penanggulangan stunting tersampaikan secara efektif kepada pelaksana di lapangan. Di Jakarta Timur, mekanisme komunikasi selama implementasi kebijakan umumnya berlangsung secara resmi melalui surat edaran, rapat koordinasi, dan sosialisasi program dari Dinas Kesehatan kepada puskesmas serta kelurahan. Komunikasi ini cenderung bersifat vertikal dan instruktif, dengan aliran informasi lebih banyak dari atas ke bawah. Minimnya komunikasi horizontal antara instansi seperti puskesmas, kader Posyandu, PKK, dan pihak kelurahan menjadi hambatan dalam membangun pemahaman bersama dan tindakan yang terpadu. Akibatnya, beberapa kegiatan sering tumpang tindih karena kurangnya koordinasi langsung di tingkat pelaksana. Temuan ini sejalan dengan Malahayati (2022), yang menunjukkan bahwa komunikasi antarsektor masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan stunting, terutama

terkait penyesuaian jadwal dan pelaporan kegiatan antar lembaga. Selain itu, pemanfaatan media komunikasi digital, seperti grup WhatsApp koordinasi, dashboard pelaporan online, atau sistem e-Posyandu, belum optimal padahal berpotensi mempercepat penyebaran informasi. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi horizontal dan integrasi teknologi digital menjadi strategi penting untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga serta mempercepat respons terhadap masalah di lapangan (Malahayati, 2022; Kementerian Kesehatan RI, 2021).

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks pelaksanaan kebijakan mencakup elemen manusia, finansial, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan yang cukup signifikan. Jumlah kader Posyandu di beberapa daerah belum ideal dibandingkan dengan jumlah balita yang perlu dipantau. Bahkan di beberapa kelurahan, satu kader harus mengatasi lebih dari 40 anak dalam satu siklus posyandu bulanan. Selain itu, kekurangan alat pengukur antropometri yang sesuai standar WHO dan kurangnya pelatihan lanjut juga menghambat akurasi data dan kualitas layanan. Pelatihan dasar telah dilaksanakan, tetapi pelatihan lanjut seperti penggunaan aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan pelatihan gizi berbasis komunitas masih belum merata. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Julianti dan Elni (2022) yang menunjukkan bahwa pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan bisa meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan pengukuran antropometri dengan akurasi yang lebih baik ($p = 0,001$). Dari sisi keuangan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah masih terbatas. Dana operasional posyandu mayoritas masih bergantung pada APBD atau dana kelurahan, yang tidak selalu mencukupi kebutuhan logistik, transportasi, dan alat kesehatan. Dengan demikian, diperlukan strategi untuk memperkuat sumber daya melalui kerja sama lintas sektor, contohnya dengan CSR dari perusahaan lokal atau organisasi swadaya masyarakat guna mendukung edukasi gizi dan penyediaan alat pengukur yang standar.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap atau karakter para pelaksana mencerminkan sejauh mana para kader dan petugas memiliki komitmen, semangat, serta keinginan untuk melaksanakan kebijakan dengan serius. Dalam studi ini, kader Posyandu di Jakarta Timur menunjukkan tingkat kesetiaan yang tinggi, terutama karena adanya tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat setempat. Kebanyakan kader bekerja secara sukarela karena peduli pada kesehatan ibu dan anak. Namun, semangat tersebut kadang menurun akibat kurangnya penghargaan dan insentif yang cukup. Beberapa kader menyatakan bahwa banyaknya beban kerja tidak sebanding dengan dukungan finansial yang mereka terima. Ini sejalan dengan penelitian IPM2KPE (2023) yang menyebutkan bahwa motivasi kader dapat meningkat secara signifikan jika memperoleh dukungan berupa insentif berbasis kinerja, penghargaan non-finansial, dan dukungan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memikirkan skema insentif yang berkelanjutan agar semangat kader tetap terjaga dan kualitas layanan posyandu dapat meningkat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Jakarta Timur masih dianggap rumit dan berlapis. Setiap lembaga (Dinas Kesehatan, PKK, puskesmas, kelurahan, hingga RT/RW) memiliki mekanisme serta jalur pelaporan yang berbeda-beda, yang sering kali tidak saling terhubung. Keadaan ini mengakibatkan pengulangan data, keterlambatan laporan, dan kesulitan dalam melakukan pemantauan secara langsung. Birokrasi yang terlalu panjang juga menghambat kelincahan pelaksana di lapangan untuk berinovasi. Seperti yang diusulkan oleh Jurnal Kreativitas Malahayati (2023), digitalisasi sistem pelaporan dengan menggunakan aplikasi e-posyandu dan integrasi data gizi antar lembaga bisa mempercepat proses pengambilan keputusan serta menjamin konsistensi data. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi sistem koordinasi dengan pendekatan digital dan penyederhanaan proses supaya pelaksanaan program lebih efisien dan responsif terhadap situasi di lapangan.

Kerja Sama Antar Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi untuk mengatasi stunting bersifat kompleks dan melibatkan berbagai sektor. Ini meliputi aspek kesehatan, tetapi juga pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada seberapa baik kolaborasi antar sektor dan keterlibatan aktif masyarakat.

Menurut pandangan Collaborative Governance yang dinyatakan oleh Emerson dan Nabatchi (2015), kolaborasi yang sukses memiliki ciri-ciri seperti adanya komitmen kolektif, rasa saling percaya antara lembaga, komunikasi yang terbuka, dan kepemimpinan yang kolaboratif. Di Jakarta Timur, berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan, PKK, puskesmas, serta organisasi

sosial telah bersama-sama mendorong program Posyandu Terpadu. Sebagai contoh, kegiatan penyuluhan mengenai gizi berlangsung melalui kerjasama dengan sektor pendidikan, termasuk sekolah PAUD dan TK serta organisasi masyarakat.

Namun, tingkat partisipasi dan efektivitas kerjasama ini belum merata di seluruh kawasan. Beberapa kelurahan berhasil mencapai hasil yang baik karena adanya koordinasi yang intens dan dukungan dari tokoh masyarakat, sementara di lokasi lain masih terjadi secara acak. Penelitian oleh Global Health Science Group (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi antar sektor dapat menggandakan efektivitas intervensi stunting bila didukung dengan mekanisme koordinasi yang rutin dan berbasis data.

Selain dari segi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat juga sangat penting untuk keberlanjutan kebijakan ini. Para kader Posyandu berperan sebagai agen perubahan sosial yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Menurut Nadeak et al. (2020), pendidikan mengenai gizi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pola makan sehat, ASI eksklusif, dan cara perawatan bayi yang baik. Ini dapat dibuktikan di lapangan: daerah dengan kader aktif yang melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah memiliki tingkat partisipasi ibu balita yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang hanya melaksanakan kegiatan posyandu secara formal setiap bulan.

Dengan demikian, pendekatan partisipatif yang berfokus pada komunitas harus terus ditingkatkan, baik melalui pembentukan kelompok ibu sadar gizi (KISAGI), forum gizi di tingkat kelurahan, maupun kerjasama dengan karang taruna dan organisasi keagamaan. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekadar melibatkan mereka sebagai pelaksana, tetapi juga memungkinkan mereka menjadi pengambil keputusan lokal yang memahami konteks sosial budaya di daerah mereka.

Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Pelaksanaan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada banyak elemen yang secara signifikan memengaruhi baik keberhasilan maupun halangan dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan stunting di Jakarta Timur.

Faktor yang Mendorong:

1. Tersedianya dukungan dari kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti Strategi Nasional (Stranas) untuk Percepatan Pencegahan Stunting 2018–2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai Ketahanan Gizi dan Pemberdayaan Keluarga, yang memberikan dasar hukum dan arahan yang jelas bagi pelaksana.
2. Keterlibatan aktif kader Posyandu yang memiliki komitmen tinggi dan berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan di komunitas.
3. Kerja sama antar sektor, terutama dengan bidang pendidikan, lembaga sosial, dan PKK, yang juga berkontribusi dalam mendiseminasi informasi mengenai gizi serta mendampingi keluarga.
4. Dukungan dari masyarakat dan tokoh setempat yang memperkuat keberlanjutan program di tingkat masyarakat.

Faktor yang Menghambat:

1. Minimnya pelatihan lanjutan serta pendampingan teknis untuk kader, terutama terkait penggunaan alat antropometri digital dan aplikasi e-PPGBM.
2. Terbatasnya fasilitas seperti timbangan bayi digital, microtoise, dan alat ukur tinggi badan sesuai standar WHO.
3. Lemahnya koordinasi antar sektor dan sistem pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi di antara berbagai instansi.
4. Rendahnya insentif dan beban kerja yang tinggi menyebabkan penurunan motivasi sebagian kader dalam jangka waktu panjang.
5. Defisit pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan monitoring, evaluasi, dan transparansi data di tingkat kelurahan.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan klasik yang berupa ketidakmerataan kapasitas di berbagai daerah dan lemahnya pengelolaan data antar sektor.

Dampak Pelaksanaan terhadap Penurunan Stunting

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis, penerapan kebijakan untuk mengatasi stunting berbasis Posyandu Terpadu di Jakarta Timur menunjukkan hasil yang cukup baik. Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta (2023), prevalensi stunting di daerah

tersebut mengalami penurunan sekitar 1,8% dalam setahun terakhir. Meskipun angka ini belum memenuhi target nasional, namun menunjukkan pola penurunan yang konsisten berkat penguatan peran kader dan kerja sama antarsektor.

Sebuah studi dari Jurnal Ilmu Medis Indonesia (2025) memperkuat hasil ini dengan menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki sistem koordinasi lintas sektor yang baik serta pendanaan yang konsisten mengalami penurunan prevalensi stunting lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang memiliki pola koordinasi sektoral yang kurang baik. Hasil penelitian JIMI (2024) juga memperkirakan bahwa peningkatan komunikasi dan kerja sama tingkat komunitas dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting nasional sampai 14% pada tahun 2024.

Dampak positif lainnya terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gizi anak dan pola hidup sehat, serta meningkatnya keterlibatan keluarga dalam kegiatan posyandu. Program penyuluhan menggunakan media audiovisual dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader terbukti berhasil menumbuhkan pemahaman akan pentingnya memberikan ASI eksklusif dan makanan pendamping yang bergizi. Dengan demikian, meskipun masih ada tantangan, arah kebijakan penanggulangan stunting di Jakarta Timur sudah berada di jalur yang benar, terutama jika pemerintah daerah dapat meningkatkan dukungan sumber daya, memperbaiki mekanisme koordinasi antarsektor, dan memastikan keberlanjutan program di tingkat komunitas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting melalui Posyandu Terpadu di Jakarta Timur telah berjalan, namun efektivitasnya masih belum sepenuhnya tercapai. Posyandu sudah melaksanakan berbagai kegiatan seperti penimbangan, pengukuran pertumbuhan, edukasi gizi, serta rujukan kasus stunting, tetapi pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan yang cukup signifikan. Keterbatasan pelatihan kader menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketepatan pengukuran dan kualitas layanan. Selain itu, sarana dan prasarana posyandu masih belum merata, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sistem pelaporan yang belum terintegrasi juga menimbulkan duplikasi data dan menghambat proses pemantauan. Meskipun demikian, kader posyandu tetap berperan penting sebagai penggerak utama di masyarakat serta memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan seperti peningkatan kapasitas kader, penguatan koordinasi lintas sektor, modernisasi fasilitas posyandu, dan pemanfaatan teknologi digital agar implementasi kebijakan penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang optimal bagi kesehatan masyarakat.

E. Referensi

- Anggraini, R., & Putra, D. (2023). Efektivitas Posyandu dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting: A Literatur Review. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1). Universitas Pahlawan. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v7i1.9982>
- Aulia, F. O., & Dewi, P. (2025). Kontribusi kader Posyandu dalam intervensi stunting: Kajian literatur tahun 2023–2025. *Jurnal Ilmu Medis Indonesia*, 4(2), 155–168.
- Aulia, F. O., & Purnamawati, D. (2025). Kontribusi Kader Posyandu dalam Intervensi Stunting: Kajian Literatur Tahun 2023–2025. *Jurnal Ilmu Medis Indonesia*, 4(2), 155–168. <https://doi.org/10.35912/jimi.v4i2.4687>
- Berita Jakarta. (2023). Program Mabar Tawa berhasil turunkan kasus stunting di Cipayung.
- Damanik, S. M., Sitorus, E., & Mertajaya, I. M. (2021). Sosialisasi pencegahan stunting pada anak balita di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. *Jurnal Comunità Servizio*, 3(1), 552–560. <https://doi.org/10.33541/cs.v3i1.2909>
- Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy (14th ed.). Pearson.
- Edukasi penerapan gizi seimbang berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan anak balita stunting di Desa Waworoni, Konawe Selatan. *Jurnal Stunting Pesisir dan Aplikasinya*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.36990/jspa.v3i1.1432>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Gentari. (2020). Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III. *Jurnal Gentari*.

- Julianti, E., & Elni, E. (2022). Paket intervensi stunting terhadap keterampilan kader Posyandu dalam pencegahan stunting pada balita. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(2), 927-934. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i2.3091>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pelaksanaan Posyandu dalam Kerangka Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Data dan Informasi Program Percepatan Penurunan Stunting. Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023: Hasil Utama. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lestari, W., Margawati, A., & Rahmawati, I. (2022). Stunting and its impact on cognitive development in early childhood: A systematic review. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 14(2), 85-97.
- Marlina, E. D., Munawarah, R., & Wahyuningsih, I. (2025). Edukasi Gizi Seimbang pada Anak sebagai Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting di RW 03, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Jakarta Timur. *Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan*, 3(2), 91-98.
- Mirong, I. D., Diaz, M. F., & Kristin, D. M. (2023). Pencegahan stunting pada balita melalui pemberdayaan ibu hamil dan keluarga. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 5(4), 1341-1346. <https://doi.org/10.37287/jpm.v5i4.2537>
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. (2023). Prevalensi stunting Jakarta Timur sebesar 14,4 persen dan upaya penanganannya. Siaran Pers Pemkot Jakarta Timur.
- Perbedaan asupan protein hewani pada balita stunting dan tidak stunting di wilayah kerja Puskesmas Sidorejo Kidul, Kota Salatiga. Ghidza: *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 9(1), 159-167. <https://doi.org/10.22487/ghidza.v9i1.1532>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/184917/perpres-no-72-tahun-2021>
- Rahmawati, N., & Lestari, T. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Menurunkan Angka Stunting. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 4(2). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ramadhanty, T., & Rokhaidah, R. (2021). Pengaruh edukasi kesehatan dengan media audiovisual terhadap pengetahuan ibu tentang stunting pada balita di Posyandu Melati 1 Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 5(2), 58-64. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v5i2.3173>
- Retnani, A. D., & Hartati, S. (2022). Pelatihan dan pendampingan kader kesehatan perempuan tentang deteksi dini stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*, 5(10), 3697-3706. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i10.7835>
- Sulistyorini, E., Palupi, F. H., & Fauziah, A. N. (2024). Implementasi Komunikasi Antar Pribadi (KAP) oleh kader Posyandu sebagai upaya strategi komunikasi perubahan perilaku dan sosial untuk pencegahan stunting. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KESMAS RESPATI*, 9(1), 48-54. <https://doi.org/10.35842/formil.v9i1.539>
- UNICEF. (2021). Child Malnutrition: Key Facts and Data. New York: UNICEF.
- Upaya pencegahan stunting dengan pemanfaatan kebun gizi sebagai inovasi dalam peningkatan gizi anak. *Jurnal Bina Desa*, 6(2), 161-166. <https://doi.org/10.15294/jbd.v6i2.49525>
- World Health Organization. (2020). Nutrition Landscape Information System (NLiS) Stunting. Geneva: WHO.